

Relasi Muhammadiyah dan Politik pada Pemilu 2019 Tentang Pemilihan DPD RI (Studi Kasus PDM Kota Yogyakarta)

Raja Faiz El Shidqi¹, Djoni Gunanto²

¹Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H Ahmad Dahlan, 15419

E-mail: rajafaidz@gmail.com

ABSTRAK

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia telah memiliki banyak pengalaman pada setiap perjalanannya. Dalam aspek kehidupan berbangsa yang bersinggungan dengan dinamika politik Nasional, Muhammadiyah telah tercatat beberapa kali terlibat aktif di dalamnya, sehingga sampai pada akhirnya muncul Khittah Muhammadiyah Ujung Pandang 1971 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis dan dipertegas kembali melalui Khittah Denpasar 2002. Namun, pandangan tersebut bisa berbeda dalam konteks Pemilihan DPD RI yang tidak melibatkan Partai Politik didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan tentang relasi Muhammadiyah dan Politik di tahun 2019 dalam Pemilihan DPD RI serta langkah dan strategi Muhammadiyah dalam melakukan perjuangannya secara khusus pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan beberapa teori dalam melakukan analisis seperti teori Kekuasaan, *civil society*, dan Strategi Komunikasi Politik. Selain itu, metode yang digunakan dalam mencari data ialah, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah tetap melakukan perjuangan politik secara taktis dalam konteks Pemilihan DPD RI seperti apa yang diputuskan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY yang secara tegas mengeluarkan surat keputusan dukungan terhadap kadernya sebagai kontestan dalam Pemilihan DPD RI.

Kata kunci: *Relasi, Muhammadiyah dan Politik, DPD RI, Pemilu 2019, Civil Society*

ABSTRACT

Muhammadiyah as one of the largest and oldest Islamic organizations in Indonesia has had a lot of experience in each of its journeys. In the aspect of national life that intersects with the dynamics of national politics, Muhammadiyah has been recorded as being actively involved in it for several times, so that in the end the Basic Strategies of Muhammadiyah Ujung Pandang 1971 appeared which stated that Muhammadiyah was no longer involved in Practical Politics and was reaffirmed through the Basic Strategies of Denpasar 2002. However, this view can be different in the context of the RI DPD election which does not involve political parties in it. The purpose of this study is to describe the relationship between Muhammadiyah and Politics in 2019 in the RI DPD Election and Muhammadiyah's steps and strategies in carrying out its political struggle specifically for the Yogyakarta Muhammadiyah Regional Leadership, this research uses a descriptive method with a qualitative approach. Using several theories in conducting analysis such as the theory of Power, civil society, and Political Communication Strategy. Apart from that, the methods used to search for data are interviews, documentation and observation.

From this research, it can be concluded that Muhammadiyah continues to carry out political struggles tactically in the context of the RI DPD election as decided by the Regional Leaders of Muhammadiyah DIY, who explicitly issued a letter of support for its cadres as contestants in the RI DPD election.

Keywords: *Relations, Muhammadiyah and Politics, DPD RI, 2019 Election, Civil Society 2019.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah organisasi yang besar di Indonesia, Muhammadiyah akan terus menghadapi berbagai macam tantangan yang senantiasa hadir dalam setiap langkah geraknya, tidak terkecuali dalam urusan politik. Walaupun Muhammadiyah didirikan dalam konsen gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah secara terang melibatkan diri dalam satu kontestasi politik nasional, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi satu kontestasi dimana Muhammadiyah sebagai organisasi terlibat langsung dalam prosesnya mendorong kader terbaiknya agar terpilih menjadi wakil dari daerah nya masing-masing. Tentu sebagai perwakilan organisasi, Muhammadiyah memang memilih pencalonan DPD RI tidak berdasarkan dari Partai Politik agar bisa secara leluasa menyampaikan dan mengawal aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah ke tingkat pemerintahan pusat¹.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana relasi dan keterlibatan Politik Muhammadiyah pada Pemilihan Anggota DPD RI di Pemilu 2019?
2. Apa langkah taktis dan strategi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Yogyakarta dalam menghadapi memperjuangkan kadernya pada Pemilihan DPD RI di Pemilu

Rumusan Masalah

Bagaimana relasi Muhammadiyah dan Politik pada Pemilihan DPD RI 2019 serta

langkah dan strategi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memperjuangkan kadernya di ranah politik dengan menanamkan nilai-nilai yang diyakini ideal oleh Muhammadiyah dalam membangun bangsa

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kekuatan Relasi Muhammadiyah dan Politik pada Pemilu 2019 tentang Pemilihan DPD RI.
2. Menjelaskan positioning atau sikap Muhammadiyah pada Pemilihan DPD RI di Pemilu 2019.

2. LANDASAN TEORI

Teori Kekuasaan

Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang ia maksud sebagai sebuah kekuasaan, yakni (1990: 94-95)²

- a) Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa didapat, dicapai, digunakan ataupun dibagikan sebagai suatu hal yang dapat digenggam atau bahkan punah. Tetapi, kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak
- b) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang ada untuk menguasai dan dikuasai.
- c) Kekuasaan datang dari bawah yang mengharapkan bahwa tidak ada lagi kondisi *binary opositions* karena kekuasaan mencakup dalam keduanya.
- d) Relasi kekuasaan memiliki sifat intensional dan non-subjektif.
- e) Di mana terdapat sebuah kekuasaan, di sana juga terdapat anti kekuasaan (*resistance*)

Teori Civil Society

Dalam pengertian yang dicetuskan oleh

¹ Dani Fadillah, *Dinamika Komunikasi Organisasi Muhammadiyah DIY dan Pencalonan Senator DPD RI dalam Tinjauan Teori Kepribadian Kelompok Raymond Cattell*, MEDIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 03 No. 01 Tahun 2019. Hlm. 2

² Kamahi, Umar. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017. Hlm. 118

Alexis De Tocqueville³. Civil Society merupakan sebuah kelompok penyeimbang kekuatan negara dan bukan subordinat negara, masyarakat sipil sebagai suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi dan bisa menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan negara melakukan intervensi terhadap masyarakat sipil.⁴

Strategi Komunikasi Politik

Carl Von Clausewitz merumuskan strategi politik sebagai seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang, sedangkan Martin Anderson berpendapat bahwa strategi politik sebagai suatu seni yang melibatkan kemampuan intelegensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam upaya mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan secara maksimal dan efisien (Cangara, 2009:292).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bersifat mendalam dan tervalidasi, senantiasa mengikuti proses yang ada secara mandiri tanpa diwakili oleh siapapun dalam proses pengumpulan data.⁵

Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif atas dasar penelitian yang bersifat sosial dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah kondisi, situasi atau fenomena realitas yang terjadi masyarakat khususnya warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang tentu dipengaruhi oleh kebijakan yang diturunkan dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Wilayah.

Data yang dikumpulkan melalui *interview/wawancara*, dokumentasi, *library research*.

Teknik analisa data menggunakan

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data yaitu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian yang mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman dan dimasukkan ke dalam klasifikasi dan kategori tertentu. Penyajian data yaitu dalam bentuk menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, table atau semacamnya. Kesimpulan yaitu langkah akhir berupa implementasi prinsip induktif melalui konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan penafsiran yang telah dibuat sebelum sampai kepada kesimpulan di akhir penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Masyarakat Kota Yogyakarta

Kondisi sosial politik yang ada di Kota Jogjakarta dapat dikatakan hampir sama dengan keadaan sosial politik di daerah lain khususnya secara nasional, perbedaan yang kontras ada di dalam momentum pemilihan kepala daerah, yaitu Gubernur. Tidak ada proses pemilihan gubernur di Provinsi DIY, setiap keluarga Keraton yang diangkat menjadi Raja secara otomatis menjadi Gubernur DIY dan Pakualam menjadi Wakil Gubernurnya, karna hal tersebut hasrat politik masyarakat Jogja tersalurkan ke wilayah lain seperti Pemilu Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi/Kota serta Pilkada dan Pilbup.

Pandangan Dan Dinamika PP Muhammadiyah Pada Pemilu 2019

Melalui Lembaga Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik (LHKP), Muhammadiyah menganalisis dan memberikan pandangan atas kontestasi serta dinamika kebangsaan yang sedang terjadi di panggung politik nasional. Namun, perlu diakui bahwa amat disayangkan LHKP PP Muhammadiyah pada kontestasi

³ Charles Alexis Clerel de Tocqueville (Paris, 29 Juli 1805 – Cannes, 16 April 1859) adalah seorang filsuf dalam bidang politik dan sejarah dari Prancis

⁴ Wan Asrida, Auradian Marta, Sofyan Hadi. *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20, No. 2 Tahun 2021. Hlm. 134.

⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). Hlm. 11

Pemilu 2019 kemarin dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang secara khusus seharusnya mempersiapkan segala kebutuhan organisasi dan warga Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik, hal yang menambah keruh suasana adalah polarisasi yang terjadi dan telah bertahan sejak Pemilu 2014. Terpecahnya masyarakat Indonesia termasuk warga Muhammadiyah di akar rumput maupun di tingkat Pusat akhirnya tak mampu ditangani secara maksimal. Minimnya agenda pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah di Indonesia serta minimnya konsolidasi yang dilakukan untuk menjaga jalannya organisasi tetap mulus tanpa guncangan yang berarti akibat polarisasi yang terjadi merupakan tolak ukur sederhana ketidak maksimalnya LHKP dalam menjalankan peran dan fungsinya ketika 2 Pemilu kemarin (2014 dan 2019).

Keterlibatan Muhammadiyah Dalam Pemilihan DPD RI

Muhammadiyah kerap mengidentifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam politik praktis, akan tetapi realitas yang terjadi terkadang kontra atas apa yang disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis terlebih politik yang berorientasi pada kekuasaan. Dalam beberapa literatur mengenai sejarah panjang perjalanan Muhammadiyah di dunia politik membuktikan bahwa Muhammadiyah pernah turut aktif dalam politik yang berorientasi pada kekuasaan atau struktural seperti ketika menjelang akhir kekuasaan Orde Lama dengan pendekatan yang dilakukan kepada Ir. Soekarno, politik helm dan kedekatan Muhammadiyah dengan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru sehingga menjelang akhir kekuasaannya terlahir beberapa lembaga sebagai bentuk kedekatan umat Islam terhadap penguasa khususnya Muhammadiyah yang juga mengirimkan kader terbaiknya menduduki posisi-posisi tertentu.

Namun, netralitas politik Muhammadiyah terlihat tidak berlaku dalam

kontestasi Pemilihan calon Anggota DPD RI, pasalnya DPD RI merupakan sebuah lembaga legislatif yang memang terbuka pencalonannya untuk setiap orang mewakili daerahnya masing-masing dan bukan melalui partai politik, kesempatan tersebut terbuka untuk anggota-anggota organisasi khususnya Muhammadiyah untuk mencalonkan dan mendorong kadernya untuk masuk menduduki kursi legislatif, selain untuk mewakili daerahnya juga untuk mewakili kelompok organisasinya. Bahkan ada pendapat bahwa siapapun kader yang memutuskan terlibat dalam gelanggang politik akan direstui, ditambah jika kader tersebut membawa political will daripada Muhammadiyah⁶.

Keputusan Musypimwilsus Terkait DPD RI

Muhammadiyah melalui khittah Denpasar tahun 2002 menegaskan bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics/politik praktis). Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung (high politics). Atas landasan tersebut Muhammadiyah dalam kontestasi pemilihan DPD RI di Pemilu hanya berperan mewedahi keinginan dan niat baik warga Muhammadiyah di tingkat akar rumput untuk memperjuangkan keinginannya supaya Muhammadiyah memiliki wakil di lembaga legislatif untuk memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah dan Umat Islam secara lebih luas.

Berdasarkan hasil dari Musyawarah Pimpinan Daerah Khusus (Musypimdasus) atas penerimaan sejumlah rekomendasi nama-nama yang diberikan oleh masing-masing Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah meneruskannya kepada Pimpinan Wilayah untuk

⁶ Infa Wilindaya, *Menelaah Paham Kebangsaan Muhammadiyah*, Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam, 2018, Vol. 42 No. 2, hlm. 35

kemudian kembali dibahas secara bersama dengan Pimpinan Daerah lainnya di agenda Musyawarah Pimpinan Wilayah Khusus (Musypimwilsus), adapun sejumlah pembahasan yang muncul dalam agenda tersebut adalah tentang track record dari nama yang di rekomendasikan selama menjadi kader Muhammadiyah, ada setidaknya dua kriteria utama yang menjadi bahan pertimbangan musyawarah terhadap sosok yang akan disidangkan, yaitu : Pertama, nama yang direkomendasikan pernah mengikuti jenjang kaderisasi di Muhammadiyah, khususnya Baitul Arqam. Kedua, pernah berkontribusi untuk Muhammadiyah atau Ortom sebagai Pimpinan dalam periode waktu tertentu.

Kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keputusan terkait dukungan terhadap formil terhadap kader Muhammadiyah yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD RI hanya dimiliki oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Wilayah/Provinsi, dan di dalam pembahasan Musypimwilsus terdapat juga rumusan kontrak politik dan komitmen bagi yang bersangkutan kepada Organisasi Muhammadiyah khususnya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Setelah musyawarah menemukan mufakat maka ditetapkanlah satu nama yang berhak didukung mewakili Muhammadiyah dalam kontestasi pemilihan DPD RI.

Strategi Dan Peran Muhammadiyah Kota Yogyakarta

Dalam upaya menindaklanjuti segala program yang berkaitan dengan politik juga memaksimalkan perjuangan politik Muhammadiyah, secara khusus melaksanakan agenda pemantapan pemenangan DPD RI yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah dengan inti pembahasan berupa strategi dan pembinaan terhadap tim khusus calon DPD RI yang diusung oleh Muhammadiyah DIY⁷.

⁷ Pdmjogja.org, *Langkah dan Strategi Pemenangan dalam Pemilu*

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 terdapat setidaknya 6 identitas faksi masyarakat yang ada di DIY khususnya Kota Yogyakarta, yaitu identitas budaya keraton, ormas Muhammadiyah, NU, Non-Muslim, Nasionalis dan Abangan⁸. Maka dengan beragamnya faksi identitas yang ada, tentu Muhammadiyah berupaya untuk menyesuaikan model Komunikasi Politik dan Identitas yang dibawa dalam menawarkan kader terbaiknya untuk dipilih dalam pemilihan DPD RI, dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyisipkan pembahasan-pembahasan mengenai demokrasi dan idealitas dalam memilih Pemimpin serta memfasilitasi Muhammad Afnan Hadikusumo untuk ikut mendekati diri pada warga dan simpatisan Muhammadiyah dalam agenda pengajian rutin Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang. Selain itu, Pimpinan Daerah juga memfasilitasi tim Pemenangan untuk meraup suara dari karyawan yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan cara mengirimkan sebuah pesan singkat melalui SMS dengan intensitas yang terjaga dan semakin intens menjelang hari pemilihan⁹.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta analisis yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya bahwa Muhammadiyah dalam hal ini yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta terlibat aktif secara organisasi dalam perjuangan politik yang dilakukan dalam upaya memperjuangkan kader terbaiknya, yaitu Muhammad Afnan Hadikusumo untuk

⁸ Anang Masduki, Rendra Widyatama. *Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014*. Journal of Communication Studies. Vol. 5 No. 1. Hlm 1

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak M. Arri Rusdiyantara, S.T selaku Tim Pemenangan dan Bapak Noviar Handi Al Faani, SE, Ak selaku Tim Pemenangan di wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2023 dan 5 Juni 2023

menduduki kursi anggota DPD RI sebagai perwakilan Yogyakarta dan Kelompok Organisasi Muhammadiyah.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung serta menghambat dalam prosesnya seperti minimnya upaya konsolidasi yang dilakukan oleh LHKP ditingkat pusat hingga wilayah terhadap upaya Diaspora Kader sehingga terjadinya perbedaan pandangan yang cenderung bersifat penolakan, minimnya kesadaran sebagian warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan kader Persyarikatan dalam ranah pemerintahan sehingga perjuangan politik yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Adanya penolakan sebagian warga Muhammadiyah atas rekomendasi hasil Musypimwilsus terhadap M. Afnan Hadikusumo yang membuat sebagian warga Muhammadiyah justru memilih kontestan lain yang didukung oleh Partai Politik, Identitas sebagai Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah membuat mayoritas warga Muhammadiyah menyatukan suara dan melakukan upaya yang sama untuk memaksimalkan dukungan, Identitas sosok Muhammad Afnan Hadikusumo sebagai keturunan Ki Bagus Hadikusumo membuat tingkat penerimaan atas masyarakat di luar kelompok Muhammadiyah menjadi lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sholikin, (2018), *Perbedaan Sikap Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah*, Jurnal Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol. 3 No. 2.

Ahmad Syafii Maarif, (1988), *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

_____, (2000), *Independensi Muhammadiyah: Di Tengah*

Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik, Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Anang Masduki, Rendra Widyatama, (2018), *Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014*, Journal of Communication Studies, Vol. 5 No. 1.

Allan Samson, (1968), *Islam in Indonesian Politics*, Asian Survey, Vol. 8 No. 12.

Asyraf Al-Faruqi, (2022), *Relasi Muhammadiyah dan Negara Dalam Dinamika Politik di Indonesia*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Dani Fadillah, (2019), *Dinamika Komunikasi Organisasi Muhammadiyah DIY dan Pencalonan Senator DPD RI dalam Tinjauan Teori Kepribadian Kelompok Raymond Cattell*, MEDIAKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 03 No. 01.

Eni Lestari, Hertanto, Robi Cahyadi Kurniawan (2021), *Strategi KPU Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan hasil Pemilu pada pemilu 2019*, Jurnal Independen Vol 02 No 01, April 2021

Fanny Tjiptono, (2006), *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offsert.

Gili Argenti, S.IP, M.Si.,(2017), *Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2.

- Haedar Nashir, (2008), *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____, (2015), *Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah: Agenda Strategis Abad Kedua*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Harry Jesus Benda, (1980), *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harold Crouch, (1999), *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Hajriyanto Y. Thohari, (2015), *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmawan Syahputra, (2014), *Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010 – 2014*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang,
- H. Raharjo, (2019), *Metamorfosis Sarekat Islam: Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional*, Yogyakarta: Media Presindo.
- H. Nilwani, S.Ag, M.Pd., (2016), *Kiprah Muhammadiyah Dalam Kancah Politik Nasional*, Jurnal Tarbawi Khatulistiwa, Vol. 02 No. 02.
- Infa Wilindaya, (2018), *Menelaah Paham Kebangsaan Muhammadiyah*, Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 42 No. 02.
- Iskandar, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.
- Kamahi Umar, (2017), *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Al-Khitabah, Vol. 03 No. 01.
- Kenneth E. Ward, (1976), *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University.
- Lynda Lee Kaid, (2004), *Handbook of Political Communication Research*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- M. C. Ricklefs, (1995), *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- M. D. Baidawi, (2001), *Buku Putih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sekretariat PP Muhammadiyah.
- Ma'mun Murod Al-Barbasy, (2017), *Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance*, KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 34 No. 02.
- Muhammad Irfan Dwitama, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastris, Usni, Djoni Gunanto (2022), *Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan*, Jurnal Independen Vo.3 No.1, April Tahun 2022
- _____, (2008), *Sejarah Berdirinya Partai Matahari Bangsa*, Jakarta: PP PMB-AI Wasat.
- M. T. Arifin, (2016), *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Peter Schroder, (2010), *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Nouman-Stifung Fur die Freiheit.
- Pramono U. Tanthowi, (2019), *Muhammadiyah Dan Politik*:

- Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif*, MAARIF Institute, Vol. 14 No. 02.
- Ridho Al-Hamdi, (2012), *Dinamika Islam dan Politik Elit-Elit Muhammadiyah Periode 1998 – 2010*, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 03 No. 01.
- _____, (2020), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis*, Yogyakarta: IRCiSOD.
- _____, (2023), *Akal Politik Muhammadiyah: Menelaah Cara Berpikir dan Bertindak Warga Muhammadiyah Dalam Urusan Politik Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Roshian Anwar, (2006), *Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961 – 1965*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Suwarno, (2001), *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press.
- Syaifullah, (1997), *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin Jurdi, (2010), *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia Tahun 1966 – 2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- S. S. Ardhy, (2010), *Bersama Empat Tokoh Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wan Asrida, Auradian Marta, Sofyan Hadi, (2021), *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi*, Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No. 02
- Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, dkk, (2015), *Ijtihad Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zusiana Elly Triantini, (2019), *Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik*, POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam, Vol. 02 No. 02.

